



PENERAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Dongkrak Realisasi Anggaran

YOGYA (KR) - Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja turut mendongkrak realisasi anggaran. Hingga triwulan pertama, total anggaran yang mampu terserap untuk kegiatan di masyarakat cukup tinggi mencapai 104,5 miliar atau 11,12 persen dari total serapan sebesar 12,17 persen.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Kadri Renggono, realisasi belanja yang mencapai lebih dari 10 persen pada triwulan pertama merupakan hasil yang baik. "Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun

lalu, maka realisasi tahun ini jauh lebih baik. Realisasi di masing-masing OPD cukup bagus," tandasnya, Selasa (3/4).

Tingginya realisasi anggaran tersebut dinilai akibat penerapan TPP berbasis kinerja. Pasalnya, dalam menghitung tambahan penghasilan itu salah satu yang menjadi pertimbangan ialah penyerapan anggaran. Hal itu pun mendorong pegawai dalam membelanjakan anggaran sesuai dengan target yang sudah direncanakan.

Oleh karena itu, Kadri meyakini jika total serapan anggaran pada tahun ini dapat lebih baik dibanding tahun

lalu. Terlebih pegawai semakin termotivasi dengan penerapan pemberian tunjangan berbasis kinerja.

"Selain semakin rajin bekerja untuk memenuhi target, pegawai pun semakin disiplin dalam melakukan pembelanjaan," katanya yang menyebut realisasi serapan anggaran pada 2017 mencapai 88 persen.

Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Yogya, Tugiyarto, menjelaskan setiap triwulan memang ada plotting anggaran yang harus bisa dipenuhi oleh tiap OPD. Jika ada OPD yang tidak mencapai plotting tersebut, maka tunjangan yang akan diterima pegawai setem-

pat bisa berkurang.

Dengan capaian itu, Tugiyarto optimis serapan anggaran hingga akhir tahun bisa di atas 90 persen. "Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, begitu memasuki triwulan kedua dan ketiga, maka realisasi anggaran akan melonjak tajam. Makanya ketika di triwulan pertama sudah di atas 10 persen, kami optimis sampai akhir tahun nanti bisa menembus 90 persen. Untuk bisa menembus 100 persen cukup sulit karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa diprediksi seperti rencana pengadaan tanah namun akhirnya gagal," paparnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BKPP			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 25 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005